

## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN AFGHANISTAN**

Pada bab ini, penulis membahas dinamika hubungan Amerika dan Afghanistan. Mulai dari asal mula hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan sehingga mengirimkan pasukan Militer Amerika Serikat ke Afghanistan hingga sampai menarik pasukan Mileternya dalam menghadapi konflik Taliban di Afghanistan.

#### **A. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan**

Pada tahun 1921, Amerika Serikat mengakui Afghanistan setelah kunjungan resmi ke Gedung Putih oleh delegasi Afghanistan yang dipimpin Jenderal Wali Mohammad Khan. Kemudian, pertukaran serangkaian misi resmi dan korespondensi menyebabkan pembentukan hubungan diplomatik penuh antara kedua negara pada tahun 1934. Namun, hubungan diplomatik penuh baru dibangun pada tahun 1934 dan 1935, ketika kedua negara menunjuk duta besar untuk misi diplomatik masing-masing. Jauh dari stabil, hubungan antara AS dan Afghanistan, sejak berdirinya pertukaran diplomatik, telah ditandai oleh pola-pola ketegangan dan kolaborasi yang tidak konsisten (Central-Southern Asia, 2015).

Pada 22 Januari 1935, Presiden Roosevelt mengangkat William Hornibrook sebagai utusan AS pertama ke Afghanistan. Kemudian pada tahun 1943, Yang Mulia Raja Zahir Shah mengutus Abdul Hussein Aziz sebagai Duta Besar Afghanistan pertama ke Amerika Serikat. Duta Besar Aziz menyewa sebuah bangunan bersejarah untuk dijadikan sebagai Kedutaan Besar Afghanistan di Amerika Serikat. Hubungan diplomatik formal membuka pintu bagi kemajuan baru bagi kedua

negara. Di Afghanistan, proyek untuk meningkatkan infrastruktur dan peluang pendidikan berkembang. Proyek Otoritas Lembah Helmand adalah salah satu upaya paling terkenal, yang dikenal untuk pembangunan bendungan, jalan raya, bandara, dan rumah-rumah di wilayah tersebut.

Presiden Dwight D. Eisenhower membuat sejarah ketika ia menjadi Presiden AS yang pertama mengunjungi Afghanistan pada bulan Desember 1959. Dikatakan bahwa melihat Afghanistan telah lama menjadi impian Presiden Eisenhower. Berdasarkan perjalanannya di Afghanistan, Presiden Eisenhower melihat bahwa orang-orang Afghanistan sebagai "potensi besar dalam menjalankan hubungan diplomatiknya". Demikian juga, Perdana Menteri Dawood memiliki perjalanan yang sama-sama mengesankan ketika ia pertama kali mengunjungi Amerika Serikat. Tujuan dari kunjungannya untuk memperkuat hubungan AS dan Afghanistan, Perdana Menteri Dawood menandatangani perjanjian pertukaran budaya, berkeliling negara, dan menjadi warga Afghanistan pertama yang berbicara kepada Kongres AS.

Pada tahun 1963, Raja Mohammad Zahir menjadi Kepala Negara Afghanistan pertama yang mengunjungi Amerika Serikat bersama istrinya, Ratu Homeira. Sepanjang semua kunjungan resmi dan dekade-dekade berikutnya, kemitraan Amerika Serikat terus mengalami pertumbuhan, terutama sejak berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet (Embassy of Afghanistan).

Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung pada tahun 1947-1991, membuat Dunia Islam melakukan perlawanan dan menolak hegemoni antara kedua negara yang sedang berseteru secara dingin tersebut. Amerika Serikat yang mempunyai hegemoni dengan demokrasi liberalnya, dan Uni Soviet dengan Komunisme yang dianggap tema sebagai

“perluasan dan penyebaran ideologi”, maka sudah pasti negara-negara Muslim di wilayah Timur Tengah hingga Asia Tengah menjadi wilayah yang mengalami distorsi.

Pada saat berlangsungnya perang dingin, Afghanistan merupakan negeri yang mengalami tantangan dalam menghadapi modernitas dengan ideologi yang di milikinya, sekaligus menjadi tantangan besar atas perubahan struktur ideologis, khususnya di wilayah Asia Tengah. Periode abad kedua puluh menempatkan suatu kepemimpinan struktur monarki di Afghanistan yang mulai rapuh. Raja Zhahir Shah yang sudah berkuasa sejak 1933 menjadi sebuah akhir dalam menggiring berakhirnya kekuasaan monarkial di Afghanistan. Sistem parlementer yang sudah di mulainya sejak tahun 1962-1963 telah gagal menjaga posisinya sekaligus kekuatan monarki di Afghanistan. Sehingga dengan sistem parlementer ini menjadi sebuah perubahan tersendiri untuk arus modernitas di Afghanistan, ketika sistem-sistem politik ala Barat mulai diterapkan (Al-Ghiffari, 2013).

Selama Perang Dingin, Afghanistan menjadi tempat perang proksi negara adidaya untuk pengaruh di Timur Tengah. Menyusul invasi Soviet 1979 ke Afghanistan, AS secara aktif mendukung pejuang mujahidin dalam upayanya untuk menahan ancaman Komunis yang diumumkan oleh dukungan Soviet untuk pemerintah Afghanistan. Pendudukan Soviet berakhir pada 1989 dengan pengambilalihan koalisi mujahidin yang didukung AS di bawah kepemimpinan militer Ahmed Shah Massoud.

Namun, selama periode konflik di Afghanistan dari tahun 1983 hingga 2002, hubungan kedua negara mengalami penghentian dan kedutaan mereka masing-masing terpaksa ditutup. Pada tahun 2002, setelah jatuhnya rezim Taliban dan pembentukan Administrasi Sementara di Afghanistan, kedutaan besar dibuka kembali

dan hubungan dipulihkan. Sejak itu, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis sepuluh tahun untuk perdamaian dan pertumbuhan ekonomi, serta Perjanjian Keamanan Bilateral untuk memperkuat pasukan keamanan Afghanistan (Embassy of Afghanistan).

Hubungan Bilateral Ekonomi yang di lakukan Amerika Serikat dan Afghanistan di mulai dengan Afghanistan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi dengan Amerika Serikat pada tahun 2004. TIFA adalah forum utama untuk diskusi perdagangan dan investasi bilateral antara kedua negara. Ekspor dari Amerika Serikat ke Afghanistan meningkat 525% dari \$150 juta pada 2004 menjadi \$937 juta pada 2017. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan iklim bisnis, termasuk memperkuat kerangka kerja peraturan dan hukum komersial Afghanistan untuk menarik perdagangan dan investasi asing, serta untuk meningkatkan perdagangan tambahan dengan Amerika Serikat melalui pengembangan kapasitas perdagangan. Implementasi undang-undang dan kebijakan baru yang sesuai dengan WTO akan meningkatkan lingkungan bisnis dan rezim perdagangan Afghanistan, dan memberikan kerangka hukum internasional yang akan membantu lebih lanjut integrasi regional Afghanistan.

Untuk meningkatkan keamanan di Afghanistan, Militer Amerika Serikat telah terlibat di Afghanistan sejak tak lama setelah serangan 9/11 di 2001. Pada 2003, NATO mengambil alih kepemimpinan United Nations-Mandated International Security Assistance Force Mission (ISAF). Pada puncaknya, ISAF mencakup lebih dari 130.000 pasukan dari 51 NATO dan negara mitra. Pasukan ISAF berjuang bersama pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan (ANDSF) sebagai komunitas internasional yang bekerja untuk meningkatkan kemampuan ANDSF (U.S Departement of State, 2019).

## **B. Masuknya pasukan Militer Amerika Serikat di Afghanistan**

### **1. Peristiwa 9/11**

Selama di Afghanistan kelompok yang memegang kekuasaan adalah kelompok Mujahidin yang selama ini diintegrasikan dengan kelompok Taliban. Setelah terjadinya serangan teroris 9/11 menandai memburuknya hubungan yang jelas antara Afghanistan dan AS. Rezim Taliban, yang mengendalikan mayoritas Afghanistan pada saat itu, menjadi tuan rumah bagi kepemimpinan Al Qaeda yang merupakan dalang serangan 9/11, yaitu Osama Bin Laden. Menanggapi penolakan Taliban untuk menyerahkan Bin Laden, invasi skala penuh yang dipimpin AS terhadap negara itu dimulai pada 2001 sebagai bagian dari kebijakan luar negeri AS "Perang Melawan Teror" (Central-Southern Asia, 2015).



*Sumber: Remembering 9/11 in Pictures. (Howard, 2018)*

**Gambar 2. 1 Ketika terjadinya serangan 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center**

Serangan teroris terhadap gedung World Trade Centre (WTC) di New York, pada 11 September 2001 lalu masih membekas bukan hanya bagi warga Amerika Serikat tapi juga seluruh dunia. Tragedi ini menewaskan ribuan orang dan ribuan orang yang terluka. Insiden itu menjadi serangan teroris terbesar yang terjadi di Amerika dalam sejarah dan juga merupakan penyelidikan terbesar yang pernah dilakukan Biro Investigasi Federal AS (FBI).

Sebanyak 19 teroris membajak empat pesawat komersial maskapai AS, American Airlines dan United Airlines, yang berencana terbang menuju wilayah pantai barat Negeri Paman Sam pada Selasa pagi. Pesawat pertama menabrak menara WTC utara sekitar pukul 08.46 waktu lokal, sementara itu pesawat kedua menabrak gedung selatan WTC 17 menit setelahnya. Para korban tewas itu berusia mulai dari dua tahun sampai 85 tahun. Sebanyak 75-80 persen korban tewas merupakan pria. Di tempat lainnya, sebuah pesawat American Airlines bernomor 77 menabrakkan diri ke gedung Kementerian Pertahanan AS di Washington DC. Sementara itu, pesawat United Airlines dengan nomor penerbangan 93 menabrak sebuah ladang di Shankville, Pennsylvania. Saat itu, pesawat membawa 40 penumpang termasuk awak pesawat (CNN Indonesia, 2019).

Total korban dari serangan 9/11 ini pun sebanyak 2.996 orang tewas, termasuk 19 pembajak teroris yang berada di empat pesawat. Di menara kembar World Trade Center, 2.763 tewas setelah dua pesawat menabrak menara kembar. Angka itu termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan paramedis, 23 petugas kepolisian Kota New York dan 37 petugas polisi Port Authority yang berjuang untuk menyelesaikan evakuasi bangunan dan menyelamatkan pekerja kantor yang terjebak di lantai

yang lebih tinggi. Di Pentagon, 189 orang tewas, termasuk 64 di American Airlines Flight 77, pesawat yang menabrak gedung. Pada Penerbangan 93, 44 orang tewas ketika pesawat itu mendarat di Pennsylvania (History, 2019).

Serangan 9/11 memiliki efek negatif langsung pada ekonomi AS. Banyak institusi Wall Street, termasuk Bursa Efek New York, dievakuasi selama serangan. Pada hari pertama perdagangan setelah serangan, pasar turun 7,1 persen, atau 684 poin. Ekonomi New York City sendiri kehilangan 143.000 pekerjaan sebulan dan upah \$ 2,8 miliar dalam tiga bulan pertama. Kerugian terbesar adalah di bidang keuangan dan transportasi udara, yang merupakan 60 persen dari kehilangan pekerjaan. Perkiraan biaya kerusakan World Trade Center adalah \$ 60 miliar. Biaya untuk membersihkan puing-puing di Ground Zero adalah \$ 750 juta (History, 2019).

World Trade Center merupakan menara kembar yang masing-masing gedung memiliki tinggi sekitar 1.368-1.730 kaki. Pemandangan dari gedung WTC sendiri membentang 45 mil dari puncak menara, hingga dapat melihat lima wilayah kota New York, New Jersey, dan Connecticut. Menara-menara itu sangat besar dan masing-masing beratnya lebih dari 250.000 ton, berisi 99 elevator, serta memiliki 21.800 jendela. Dua menara dikelilingi oleh lima bangunan lain yang terdiri dari kompleks WTC. Menara Kembar selesai dibangun pada tahun 1973, meskipun penyewa mulai berdatangan pada bulan Desember 1970. Bangunan lainnya dibangun selama 14 tahun ke depan (9/11 Memorial & Museum, 2019).

Peristiwa 9/11 itu terjadi di salah satu pusat perkantoran dan bisnis paling sibuk di dunia. Tentunya, kejadian ini menyisakan luka bukan hanya

bagi para korban dan anggota keluarga, namun juga untuk perusahaan yang saat itu kehilangan banyak pegawai. Saat itu, setidaknya ada tiga perusahaan kehilangan ratusan pegawai (Kompas, 2019), antara lain:

a. Marsh & McLennan

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi ini kehilangan 295 orang karyawannya. Tak hanya itu, perusahaan juga kehilangan 63 orang konsultan yang saat itu sedang berada di dalam kantor. Mengutip situs perusahaan, seluruh pegawai yang masuk pada hari itu menjadi korban tewas. Ini karena posisi kantor Marsh & Lemman berada di North Tower tepatnya di lantai 93-100.

b. Aon Corporation

Saat kejadian, Aon Corporation menempati lantai 92 dan lantai 98-105 di South Tower WTC. alam peristiwa tersebut, sebanyak 176 pegawai Aon tewas, termasuk wakil direktur utamanya, yakni Kevin Cosgrove. Saat itu, Cosgrove menjadi orang yang menghubungi layanan telepon darurat 911 ketika mengetahui bahwa gedung akan runtuh. Namun sayang, panggilan tersebut harus berakhir dengan teriakan Cosgrove saat bangunan mulai runtuh tepat pada pukul 09.59 pagi.

c. Cantor Fitzgerald

Perusahaan ini bergerak di bidang jasa keuangan yang memfokuskan diri pada ekuitas institusional serta jual-beli obligasi fixed income. Mengutip situs BBC, perusahaan yang didirikan pada tahun 1945 tersebut saat kejadian berkantor di North Tower WTC lantai 101-105. Dalam

kejadian nass itu, Cantor Fitzgerald kehilangan 658 orang pegawai atau sekitar 68 persen dari total jumlah karyawannya.

Peristiwa 9/11 ini membuat Amerika mengubah kebijakan luar negerinya, dan peristiwa ini juga menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat. Tentu saja peristiwa ini menyisihkan luka bagi Amerika Serikat. Ini juga menjadi awal untuk Amerika Serikat melawan tindakan teroris manapun dan ingin memberantas teroris di seluruh dunia.

## **2. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Paska Peristiwa 9/11**

Setelah peristiwa 9/11 meninggalkan luka yang sangat dalam untuk Amerika Serikat, karena banyaknya korban yang berjatuh serta kerugian-kerugian dengan jumlah yang cukup besar. Amerika Serikat langsung mengambil tindakan tegas menghadapi dalang dari peristiwa 9/11 yang di duga sebagai tindakan terorisme oleh kelompok Islam Al-Qaeda yang di pimpin oleh Osama Bin Laden yang di lindungi kelompok Taliban di Afghanistan. Implikasinya dapat terlihat melalui berbagai paket kebijakan yang dilaksanakan setiap presiden AS paska 9/11.

### **a. Era Presiden George W. Bush**

Suasana duka masih menghiasi seluruh Negara Bagian Negeri Paman Sam usai serangan teroris pelaku serangan 9/11. Karena Gedung Kembar World Trade Center (WTC) New York diserang pesawat yang dikendalikan pembajak. Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu George Walker Bush mulai menyusun strategi, bagaimana

mengembalikan stabilitas negara dan menumpas para teroris jaringan Al-Qaeda yang ia sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan yang mengakibatkan ribuan orang tewas tersebut. Di hadapan ratusan anggota Kongres dan juga rakyat Amerika dan dunia lewat tayangan televisi, Bush berpidato. Mulai hari itu juga, dia mendeklarasikan perang melawan teroris. Presiden ke-43 AS tersebut menegaskan negaranya bertekad keras untuk memberangus seluruh teroris di muka bumi, termasuk Al-Qaeda. Juga melawan negara-negara yang mencoba memberikan bantuan atau tempat perlindungan bagi para teroris (Gunawan, 2014).

Respon yang diberikan publik Amerika Serikat dan dunia mendorong Amerika Serikat untuk segera melakukan kebijakan dalam mengatasi tragedi WTC dan perlawanan terhadap tindak terorisme. Pertemuan yang dilakukan presiden Bush dalam pembahasan tragedi WTC dengan kongres membuahkan beberapa tindakan dan kebijakan yang akan Amerika Serikat lakukan di kemudian hari. Kebijakan tersebut terbagi atas tiga kategori tercantum dalam dokumen NSS 2002 yang menekankan pada keamanan dan pertahanan internasional menggunakan jalur militer. Tindakan yang disetujui kongres salah satunya merupakan penyerangan balasan Amerika Serikat kepada Afghanistan, tempat beradanya Osama Bin Laden selaku dalang dibalik tragedi WTC dan mempersiapkan pengiriman lima puluh ribu pasukan militer kesana serta beberapa negara yang terindikasi adanya jaringan teroris dengan menyetujui anggaran perang sebanyak US\$ 40 miliar (Aldinata, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Isu Terorisme, 2018, hal. 33).

Pada tanggal 1 Juni 2002, presiden Bush berpidato yang berisikan tugas-tugas besar bagi Amerika Serikat di dalam Quadrennial Defense Review (QDR). QDR terkenal karena dirilis tepat sebelum pemilihan George W. Bush, dan dikenal dasarnya setelah peristiwa serangan 9/11 (Gutierrez, 2010). Di dalam Quadrennial Defense Review (QDR) meliputi:

- 1) *We will defend the peace by fighting terrorist and tyrants.*
- 2) *We wil preserve the peace by building good relations among great powers.*
- 3) *We weill extend the peace by encouraging.*

Invasi berskala penuh ke Afghanistan yang dipimpin AS ke negara tersebut dimulai pada 2001 sebagai bagian dari George W. Bush “*War on Terrorism*” yang menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS pada saat itu. AS mulai menyerang beberapa kelompok Islam yang sebagian besar berada di Timur Tengah, seperti kelompok Al-Shabaab di Somalia, Taliban di Afghanistan, Al-Qaeda di Afghanistan dan Irak, dan negara Islam Irak dan Suriah, untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional di seluruh dunia. AS memiliki keyakinan bahwa kelompok-kelompok Islam ini melakukan interpretasi radikal terhadap Islam dan sangat menentang Barat. AS juga yakin bahwa kelompok-kelompok ini merupakan ancaman besar bagi AS, kepentingan keamanan sekutunya, dan stabilitas seluruh kawasan (Amba, 2019).

Operasi Enduring Freedom, upaya internasional pimpinan Amerika untuk menggulingkan rezim Taliban di Afghanistan dan menghancurkan jaringan teroris Osama bin Laden

yang bermarkas di sana, dimulai pada 7 Oktober 2001. Dalam dua bulan, pasukan AS telah secara efektif memindahkan Taliban dari kekuatan operasional, tetapi perang terus berlanjut, ketika pasukan AS dan koalisi berusaha untuk mengalahkan kampanye pemberontakan Taliban yang berbasis di negara tetangga Pakistan. Osama bin Laden, dalang di balik serangan 11 September, masih bebas sampai 2 Mei 2011, ketika ia akhirnya dilacak dan dibunuh oleh pasukan A.S. di tempat persembunyian di Abbottabad, Pakistan (History, 2019).

Taliban digulingkan dari kekuasaan pada tahun yang sama, namun terus mengerahkan kekuasaan teror di seluruh wilayah. Dengan demikian, keterlibatan AS di Afghanistan berlanjut sampai hari ini, dengan AS memberikan dukungan dalam berbagai cara, termasuk bantuan kemanusiaan dan pendampingan, pembangunan kapasitas, kebutuhan keamanan, program kontra-narkotika, proyek infrastruktur dan dalam pelatihan pasukan keamanan Afghanistan.

#### **b. Era Presiden Barack Obama**

Kebijakan Amerika Serikat menghadapi terorisme merupakan kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush. Pemerintahan Bush berakhir memimpin Amerika Serikat pada tahun 2009. Selanjutnya Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden yang baru yaitu Barack Obama. Barack Obama memimpin Amerika Serikat melalui dua periode yaitu, Periode pertama (2009 – 2012) dan Periode kedua (2012- 2017). Dalam memberantas terorisme, Amerika Serikat memasuki babak baru dalam kebijakan melawan terorisme.

Pada tahun 2009 Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44 menggantikan George W. Bush. Semenjak awal kampanye, sebagai calon presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengenalkan prinsip kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Alqaeda yang berbeda dengan periode presiden sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pidato yang disampaikan Barack Obama di depan Chicago Council on Global Affairs pada 23 April 2007. Pada pidato tersebut Obama menekankan bahwa salah satu pilar kebijakan luar negeri Amerika adalah perbaikan dan rekonstruksi sistem aliansi dan kemitraan global dalam menghadapi tantangan dan ancaman.

Setelah terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, Obama menunjuk Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri nya. Pada saat tersebut Clinton mengatakan bahwa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat akan banyak mengedepankan diplomasi. Seperti halnya yang dikatakan Clinton langkah pertama Barack Obama khususnya mengenai masalah keamanan yaitu membuka kembali hubungan dengan negara-negara Islam yang sempat memanas (Milia, 2015).

Ketika tahun pertamanya sebagai presiden berlangsung, Obama menjadi yakin bahwa diperlukan perubahan dalam strategi militer sehingga pemerintah Afghanistan pada akhirnya akan dapat mengalahkan Taliban sendiri. Pada bulan Juni, ia menunjuk seorang komandan militer baru, Jenderal Stanley McChrystal, dan memintanya untuk merekomendasikan tindakan baru. McChrystal meminta 40.000 lebih pasukan dan berjanji akan mengerahkan mereka untuk melatih pasukan Afghanistan untuk memerangi

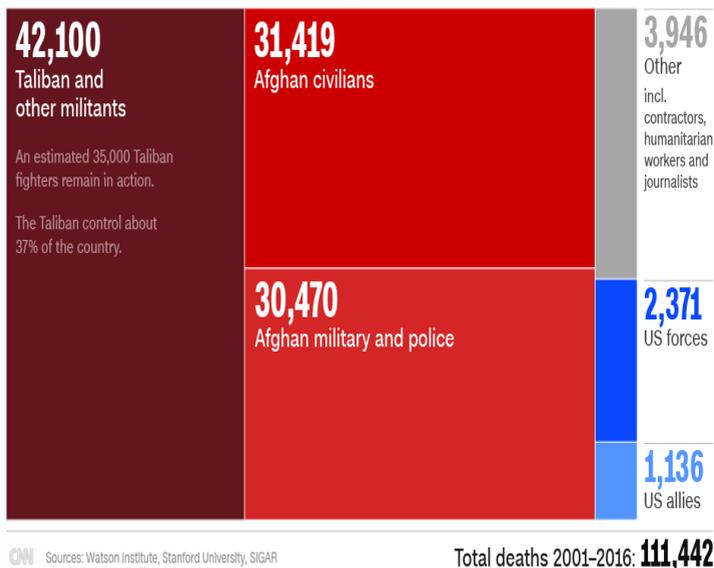
Taliban alih-alih mengandalkan kekuatan Amerika. Setelah serangkaian pertemuan diperpanjang dimulai pada bulan September, Obama mengumumkan dalam pidatonya pada 1 Desember 2009, di West Point bahwa ia telah menyetujui lonjakan jangka pendek dari 33.000 tentara dengan syarat bahwa pasukan Amerika harus mulai menarik diri dari Afghanistan pada bulan Juli 2011.

Ditengah pemerintahannya pada tahun 2010, Partai Republik kongres jauh lebih tertarik pada kebijakan dalam negeri daripada kebijakan luar negeri, yang memungkinkan Presiden Obama untuk melakukan penarikan pasukan AS sepenuhnya, setidaknya dalam hal pertempuran aktif, dari Afghanistan pada 2014. Jumlah pasukan Amerika di Afghanistan yang memuncak pada 97.000 pada tahun 2011, kemudian terjadi penurunan menjadi sekitar 12.000 pada tahun 2015. Pada 2 Mei 2011 sebagai bukti menopang kepercayaan Obama dalam masalah Militer, karena terjadinya pembunuhan pemimpin Al Qaeda yaitu Osama Bin Laden oleh tim Angkatan Laut SEAL. Pada saat itu Agen Intelijen telah menyelidiki bahwa Bin Laden bersembunyi di kompleks perumahan dekat Abbottabad, Pakistan. Walaupun kurangnya kepastian tentang masalah ini, dan menyadari risiko yang akan didapat jika melakukan serangan Militer, Obama tetap memerintahkan serangan itu, yang pada akhirnya berhasil. Dalam merayakan kematian Bin Laden, orang Amerika memuji ketegasan dan penilaian Presiden Barack Obama (Nelson, 2019).

Kebijakan penarikan pasukan militer menjadi fokus kebijakan luar negeri pada era presiden Obama sebagai upaya pemenuhan janji

kampanye. Presiden Obama telah berhasil menarik pasukan militernya di Irak, dan juga merencanakan penarikan pasukan militer di Afghanistan pada periodenya. Penarikan pasukan militer di Afghanistan pada era kepemimpinan presiden Bush belum pernah terealisasi sehingga presiden Obama agaknya sedikit lebih optimis untuk dapat melakukan penarikan pasukan walau dilakukan dengan bertahap. Namun penarikan pasukan militer di Afghanistan secara keseluruhan agaknya masih banyak mendapatkan perdebatan dan pertimbangan sehingga presiden Obama kemudian melakukan penangguhan penarikan pasukan militer di Afghanistan.

Berdasarkan data dari tahun 2001 hingga 2016, banyak sekali korban berjatuhan yang menandakan bahwa perang Afghanistan belum selesai bagi Amerika Serikat dan belum mampu memberikan jaminan keamanan bagi warga Afghanistan. Selain pasukan militer Amerika Serikat yang juga menjadi korban, ada beberapa golongan korban lainnya meliputi warga sipil Afghanistan, militer dan polisi Afghanistan, pasukan aliansi Amerika Serikat seperti pasukan NATO, contractor humanitarian worker, juga jurnalis yang berada di medan perang. Memang secara kasaran angka, operasi militer di Afghanistan pada awalnya berhasil menumbangkan sejumlah teroris dan militan keras Taliban, namun masih banyak saja korban berjatuhan di medan perang. Hal tersebut menandakan bahwa perlawanan Taliban dan Al-Qaeda masih belum berhenti (Aldinata, Kebijakan penangguhan penarikan pasukan Militer Amerika Serikat di Afghanistan dan penyebabnya, 2018, hal. 79-80).



*Sumber: Afghanistan: 16 years, thousands dead and no clear end in sight. 2017.*

### **Gambar 2. 2 Data jumlah Korban Perang di Afghanistan**

Dapat dilihat bahwa jumlah total korban perang Afghanistan mencapai 111.442 korban jiwa yang menandakan bahwa Afghanistan belum aman dari teroris dan kelompok pemberontak. Hal tersebut disamping membahayakan bagi stabilitas Afghanistan tentu akan berimbas pada negara-negara disekitarnya sehingga membuat Amerika Serikat melakukan penanggulangan penarikan pasukan untuk menghadapi kekuatan Taliban dan kelompok militan lainnya.

### c. Era Presiden Donald Trump

Pada masa pemerintahannya, Trump menggaris bawahi bahwa kebijakan luar negerinya akan ditentukan oleh "*America First*" sebuah slogan kampanye yang diutarakannya saat sebelum terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Para kritikus beranggapan AS akan mundur dari kepemimpinan globalnya yang sudah lama berdiri. Banyak orang Amerika yang bosan dengan aksi militer bertahun-tahun dan intervensi AS di luar negeri, pesan Trump disambut baik. Banyak yang merasa bahwa globalisasi telah menempatkan pekerja Amerika di belakang kepentingan internasional, dan mereka mendukung apa yang mereka lihat sebagai pembelaan Trump terhadap mata pencaharian mereka (Calmes, 2019).

Dimasa pemerintahannya, sebenarnya Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump tidak punya strategi khusus. Kebijakan luar negerinya "*America First*" yang diuraikan di situs web Gedung Putih tampaknya merupakan ekspresi resmi dari visi kebijakan luar negeri populis nasionalis Trump. Pemerintahan Trump "Berfokus pada kepentingan Amerika dan keamanan nasional Amerika" dan mencari perdamaian melalui kekuatan. Prioritas utamanya adalah memerangi "Kelompok-kelompok teror Islam radikal." Melalui operasi militer yang agresif dan inisiatif lain, ia berupaya menghancurkan dan mengalahkan kelompok-kelompok ini. Perluas berbagi intelijen, dan terlibat dalam perang cyber. Selanjutnya, pemerintah bertujuan untuk membangun kembali militer Amerika dan mendapatkan dominasi militer (Leffler, 2017).

Sampai saat ini sebetulnya tidak ada yang berbeda antara masa kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Presiden Trump. Keduanya masih mengandalkan kekuatan militer dan tekanan diplomatik untuk menyingkirkan para militan. Pemerintahan Trump mendesak pasukan Afghanistan untuk mundur dari kawasan terpencil yang saat itu dikuasai Taliban. Mereka diminta lebih fokus untuk mengamankan perkotaan. Kebijakan itu sama seperti yang pernah dilakukan Obama dan Bush.

Dalam pidatonya dari sebuah pangkalan militer di luar kota Washington, Trump menganggap “Pendekatan berbasis kondisi” bertujuan untuk mengalahkan terorisme di Afghanistan dan menegaskan Amerika tidak akan lagi menggunakan tentaranya untuk membangun demokrasi atau membangun kembali negara lain. Trump beranggapan sasarannya adalah menghentikan timbulnya kembali tempat berlindung bagi teroris yang mengancam Amerika dan memastikan mereka tidak memiliki senjata nuklir.

Di tahun 2017, disaat awal pemerintahannya, Trump telah menyetujui pengiriman 4.000 tentara tambahan ke Afghanistan. Sebelumnya, ada sekitar 8.400 tentara Amerika di Afghanistan yang sebagian besar menjadi penasihat tentara setempat, meskipun ada yang mengemban tugas kontra-terorisme terhadap kelompok seperti Taliban dan ISIS. Presiden Trump tidak memberikan batas waktu untuk keterlibatan tentara Amerika di Afghanistan. Presiden Trump menganggap warga Amerika sebenarnya sudah bosan karena tidak dicapai kemenangan dalam perang paling lama dimana Amerika terlibat.

Namun, bagi Donal Trump menarik diri dari Afghanistan secara terburu-buru akan menciptakan kevakuman yang akan diisi oleh teroris (Voa, 2017).

Kondisi keamanan di Afghanistan yang juga terus memburuk, jadi alasan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump mengirimkan lebih banyak serdadu Amerika Serikat. Hal tersebut dikonfirmasi pejabat intelijen AS. Menurut data intelijen AS banyak serdadu Afghanistan ditarik bahkan dipaksa meninggalkan pos penjagaan mereka di kawasan-kawasan terpencil. Itu menyebabkan pemerintah hanya bisa mengendalikan sekitar 57 persen kawasan.

Jenderal John Nicholson, komandan tentara AS di Afghanistan, mengatakan bahwa membutuhkan beberapa ribu tambahan pasukan internasional untuk memecah kebuntuan dengan Taliban. Permintaan itu dijawab AS pada akhir April, dimana Presiden Trump menggelar perundingan untuk mengirim tentara AS dan pasukan koalisi ke Afghanistan. Perundingan itu mencakup pemberian lebih banyak wewenang kepada pasukan di lapangan dan melakukan tindakan yang lebih agresif terhadap pejuang Taliban. Hal ini memungkinkan konsultan militer AS untuk bekerja dengan pasukan Afghanistan di bawah level korps, yang membuat mereka lebih siap berperang. Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS juga menyebut bahwa situasi akan semakin buruk kecuali tentara AS bisa melatih pasukan Afghanistan lebih dekat ke garis depan, selain penambahan pasukan juga berarti peningkatan intelijen dan pengawasan (Kertopati, 2017).

### **C. Munculnya Gagasan penarikan pasukan Militer Amerika Serikat dari Afghanistan tahun 2018**

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump meningkatkan jumlah pasukan AS di Afghanistan sebagai bagian dari strategi baru melawan Taliban. Sekarang ada sekitar 14.000 tentara AS di Afghanistan (Qazi, 2018). Tetapi, pada tahun 2018 presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump membuat keputusan yang menggemparkan kancah internasional. Selepas memutuskan menarik seluruh pasukan di Suriah, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan mereka diperintahkan untuk segera memulangkan prajurit yang ditugaskan di Afghanistan. Penarikan pasukan secara massal merupakan tanda terbaru dari menipisnya kesabaran Trump atas intervensi militer dan perang terlama yang dijalani pasukan Amerika di luar negeri. Memang sebelumnya Trump pada tahun lalu menyetujui peningkatan pasukan AS di Afghanistan, tetapi mengakui bahwa dia sebenarnya melakukannya dengan enggan (Muhaimin, 2018).

Namun, dikabarkan mereka hanya akan menarik setengah dari jumlah keseluruhan para tentara AS di Afghanistan. Mereka diminta menarik sekitar 7000 dari 14 ribu serdadu yang saat ini ditugaskan di Afghanistan melawan Taliban (CNN Indonesia, 2018). Keputusan Trump untuk menarik pasukan dari Afghanistan tidak disetujui oleh Menteri Pertahanan Jim Mattis yang berpendapat untuk mempertahankan kehadiran militer AS yang kuat di Afghanistan untuk mendukung upaya perdamaian diplomatik. Dia mengundurkan diri tak lama setelah mendengar kemungkinan bahwa Trump akan memerintahkan penarikan. Keputusan penarikan pasukan AS ini membuat bingung sekutu-sekutu AS dan memicu reaksi keras dari rekan-rekan Trump dari Partai Republik di Kongres (Asmardika, 2018).

Gagasan adanya penarikan pasukan Militer ini masih dalam tahap pembahasan. Militer Amerika Serikat sendiri masih menyusun rencana untuk menarik beberapa ribu pasukan dari Afghanistan sambil melanjutkan semua misi besar dalam perang terpanjang dalam sejarah Amerika. Pernyataan ini dilontarkan tiga minggu setelah Presiden AS Donald Trump mencari opsi untuk penarikan pasukan yang lebih drastis. Perencanaan ini berlangsung setelah Trump memerintahkan Pentagon untuk mempersiapkan penarikan hingga setengah dari sekitar 14.000 tentara AS yang dikerahkan di Afghanistan.

Trump masih ingin mengeluarkan pasukan dari Afghanistan, pada akhirnya semuanya, tetapi penarikan saat ini mungkin akan jauh lebih sedikit dari 7.000 pasukan. Para penasihat militer telah meyakinkan Trump bahwa penarikan yang lebih kecil dan lebih lambat adalah yang terbaik untuk saat ini, meskipun para pejabat memperingatkan bahwa keputusan akhir belum tercapai dan bahwa presiden dapat memerintahkan penarikan penuh kapan saja. Beberapa pejabat yang menggambarkan rencana itu ragu-ragu untuk menyebutkan angka tertentu, mengutip sifat diskusi yang masih terus berkembang. Tetapi beberapa pihak mengatakan bahwa pasukan yang ditarik mungkin sekitar setengah dari apa yang awalnya diinginkan Trump. Setelah berbulan-bulan perdebatan internal dan advokasi yang kuat dari Menteri Pertahanan Jim Mattis. Hal itu juga akan menjadi simbol bahwa Trump serius untuk keluar dari perang.

Keputusan Donald Trump pada tahun 2018 tentang rencananya untuk Afghanistan, dan komentar keras berikutnya tentang arah perang, memicu kekhawatiran di Afghanistan dan di antara para pejabat AS dan mantan pejabat AS.

Para diplomat Amerika, yang dipimpin oleh utusan Zalmay Khalilzad, telah berusaha untuk menegosiasikan penyelesaian damai dengan Taliban, dan posisi mereka sebagian bergantung pada gagasan bahwa militer AS tidak akan pergi hingga kondisi di lapangan stabil (Lamothe, 2019).